



Penguatan Badan Usaha Milik Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada BUMDes Karya Bersama Desa Dukuhjati Kidul, Kabupaten Tegal)

Sri Sutjiatmi¹
Dimas Purbo Pambudi²

^{1,2} Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Corresponding Author: sutji.fisip@gmail.com

Article Info

Keyword:

Keyword 1;
Strengthening
BUMDes
Keyword 2;
Management BUMDes
Keyword 3;
Pandemic COVID-19

Abstract: *One BUMDes that successfully manages is in the Village of Dukuhjati Kidul, Pangkah, Tegal, Central Java. The BUMDes is called the BUMDes 'Karya Bersama' which is engaged in cattle farming business units and have been able to survive in the difficult conditions of the covid-19 pandemic. The purpose of this study is to find out more about efforts to strengthen bumdes management in the difficult pandemic conditions. This research is qualitative research with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results of this study show that there are several efforts to strengthen the management of BUMDes: first, consistent in carrying out three regulations, namely Perdes No. 5 of 2017 concerning the Establishment of BUMDes Dukuhjati Kidul, Articles of Association (AD) and Household Budget (ART); second, optimization of the quality and quantity of cattle products in order to sell high value; and the third seeks 'property rights' of land that can be used for cattle ranching land.*

Kata Kunci:

Kata kunci 1;
Penguatan BUMDes
Kata kunci 2;
Pengelolaan BUMDes
Kata kunci 3;
Pandemi covid-19

Abstrak: BUMDes yang dianggap berhasil dalam menjalankan unit usahanya salah satunya adalah BUMDes Karya Bersama di Desa Dukuhjati Kidul, Pangkah, Tegal, Provinsi Jawa Tengah. BUMDes tersebut bernama "Karya Bersama" yang bergerak pada unit usaha peternakan sapi dan telah mampu bertahan di tengah kondisi sulit pandemi covid-19. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang upaya-upaya penguatan pengelolaan BUMDes di masa pandemi yang serba sulit kondisinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya penguatan pengelolaan BUMDes: pertama, konsisten dalam menjalankan tiga regulasi yaitu Perdes Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan BUMDes Dukuhjati Kidul, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); kedua, optimalisasi kualitas dan kuantitas produk peternakan sapi agar bernilai jual tinggi; dan ketiga mengusahakan 'hak milik' tanah yang dapat digunakan untuk lahan peternakan sapi.

Article History: Received 2-Agustus-2021, Revised 19-September-2021, Accepted: 27-Oktober-2021

PENDAHULUAN.

Pembangunan perekonomian suatu negara merupakan sebuah sistem yang kompleks dan saling terkait. Bagian terkecil dari sebuah negara adalah desa yang harus menjadi fokus utama pembangunan. Hadirnya Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi di desa yang tujuannya untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika BUMDES mampu berjalan dengan baik, terlebih mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi pengangguran, maka kedepannya desa akan semakin sejahtera dan mandiri (Utara, 2020). Eksistensi pembentukan dan pengelolaan BUMDes tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Saragi & Abdullah, 2020).

Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis (Barelli et al., 2018). Maka dari itu, sudah sepatutnya pemerintah mendengar aspirasi dan memprioritaskan pembangunan dari yang terbawah yaitu berawal dari desa. Berbagai regulasi pada tingkat pusat telah dibuat seperti dengan adanya regulasi turunan dari UU Desa tersebut yaitu Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 diuraikan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa, pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Depok et al., 2020).

Belajar dari pengalaman masa lalu, suatu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi desa yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud adalah dinamakan Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes (Alkadafi, 2014). Mengelola BUMDes merupakan wujud untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa dan harus menjalankan 6 prinsip pengelolaannya yang meliputi kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel (Pardi & Istiyanto, 2020). Ketika desa menjalankan UU Desa dengan baik dan BUMDes konsisten menerapkan keenam prinsip tersebut maka akan mendorong BUMDes menjadi institusi yang lahir untuk mencapai kemandirian desa (Firdaus, 2018).

Mempertahankan eksistensi BUMDes tentu akan menemui tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan dalam mengelola BUMDes tak hanya datang dari internal desa itu sendiri, melainkan juga berasal dari dampak adanya pandemi covid-19. Berbagai sektor di seluruh dunia pun ikut terdampak akibat dari penyebaran virus ini seperti pendidikan, ekonomi, sosial serta pariwisata ikut terkena imbasnya (Febriana, 2021). Pada masa pandemi corona virus disease atau covid-19, setiap warga masyarakat diharapkan untuk mampu bertahan hidup dan menyesuaikan diri dalam pola hidup. Disiplin kolektif dan perilaku yang dipedomani protokol kesehatan dibutuhkan pada saat mereka beraktivitas, khususnya di ruang publik. Ini juga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 sambil beraktivitas seperti biasa (Hidayat & Warsono, 2020). Berdasarkan data survey Saiful Mujani Research and Consulting

(SMRC) tahun 2021 menunjukkan bahwa telah terjadi kondisi perekonomian yang memburuk di Indonesia selama beberapa tahun terjadinya pandemi covid-19, berikut adalah datanya.

Gambar 1. Tren Kondisi Ekonomi Nasional



Sumber: SMRC Tren Kondisi Ekonomi Indonesia 2019-2021

Menyikapi kondisi perekonomian yang memburuk, dibutuhkan berbagai upaya untuk bertahan dalam situasi sulit. Selama kondisi pandemi covid-19 seluruh lini kehidupan terganggu mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial turut merasakan dampak dari adanya pandemi. Dampak dirasakan tak hanya masyarakat yang di kota besar namun hingga desa. Dampak buruk tersebut juga turut dialami oleh BUMDes, yang harus mampu bertahan dengan cara dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak kondusif, agar tetap produktif dengan cara memanfaatkan situasi menciptakan peluang usaha yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di tengah wabah covid-19.

Sebagaimana dikutip pada Republika Online, di bawah ini terdapat 10 nama desa di Kabupaten Bogor yang mengelola BUMDES nya secara cerdas untuk memanfaatkan peluang usaha di tengah pandemi covid-19 dengan cara membuka usaha produksi *hand sanitizer* dan masker, berikut datanya:

Table 1. BUMDES yang memproduksi *hand sanitizer*

NO	NAMA DESA
1	Jatisari
2	Tarikolot
3	Rawapanjang
4	Parakan
5	Banjarwangi
6	Gunungsari
7	Cikahuripan
8	Warujaya
9	Curug
10	Kembang Kuning

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan data di atas, ada upaya kreatif dan inovatif dari BUMDes di masing-masing desa tersebut. Hal itu tercermin dari pemilihan jenis usaha yang dijalankan, sehingga barang yang dihasilkan oleh BUMDes dapat terjual karena sangat dibutuhkan di masa pandemi covid-19. BUMDes yang ingin tetap eksis dituntut untuk fleksibel dalam menghadapi kondisi yang serba tidak menentu karena pandemi. Maka dari itu, diperlukan solusi tepat untuk menjaga eksistensi BUMDes dengan mengelola usaha untuk memproduksi barang yang dibutuhkan.

Dikutip dari Harian Jogja.com, pada tahun 2016 terdapat 75.000 desa, sudah terbentuk 12.000 BUMDes yang beroperasi, tetapi dari jumlah tersebut hanya seratusan BUMDes yang dinilai sukses. Untuk mendukung kesuksesan pembentukan dan pengelolaan BUMDes, pada tingkat daerah hingga desa telah dikeluarkan regulasi diantaranya adalah Perda Kab. Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa, di tingkat desa terdapat Perdes Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan BUMDES Karya Bersama di Desa Dukuhjati Kidul Kec. Pangkah Kab. Tegal. Berdasarkan data dari pemerintah desa, BUMDes Karya Bersama mencatatkan kondisi keuangan yang baik dari unit usaha peternakan sapi selama beberapa tahun terakhir seperti pada tahun 2019 sebesar Rp. 460 juta, pada tahun 2020 sebesar Rp. 648 juta dan Rp. 960 juta pada tahun 2021, catatan gemilang tersebut pula yang menjadi salah satu faktor pendukung dilakukannya penelitian ini.

Keberadaan BUMDes di berbagai desa membawa manfaat positif bagi masyarakat, seperti BUMDES Abiantuwung yang memiliki tujuan meningkatkan perekonomian desa telah mampu memberikan dampak yang sangat positif terhadap perekonomian desa Abiantuwung (Febryani et al., 2019). Dalam penelitian ini, salah satu BUMDes yang membawa manfaat bagi masyarakat adalah pada BUMDes Karya Bersama. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong untuk melakukan penelitian ini dikarenakan kepengurusan Karya Bersama telah terstruktur secara baik, unit usahanya telah dikembangkan secara maksimal, dan pendapatan dari pengelolaannya mencatatkan nominal cukup besar. Alasan berikutnya, adalah unit usaha yang dijalankan Karya Bersama adalah unit usaha yang dapat bertahan di masa sulit pandemi covid-19 sehingga menarik untuk diteliti dengan melihat secara mendalam berbagai upaya apa saja yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya penguatan dalam pengelolaannya.

Sebagaimana diungkapkan dalam (Puspayanthi et al., 2017) berkaitan dengan penguatan pengelolaan dana desa yang merupakan bagian dari keuangan desa di desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah dikelola dengan baik dan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat (pembangunan infrastruktur desa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan desa dapat mengarah pada kemandirian desa). Dalam hasil penelitian lain menunjukkan bahwa upaya penguatan dan sinergitas BUMDes dengan lembaga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memberikan pendapatan pada lembaga sehingga dapat menunjang pengembangan serta pembangunan lembaga itu sendiri (Dzikrulloh, 2016). Penguatan BUMDes juga dapat dilakukan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan BUMDes, dengan program yang berkelanjutan (sustainable program) berupa sosialisasi dan pemetaan tentang peran serta masyarakat desa terhadap BUMDes, dan kualitas manajemen BUMDes (Bogor et al., n.d.). Dalam (Ardhana Putra et al., 2019), penguatan BUMDes juga dapat menggunakan metode focus group discussion (FGD) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dan metode ceramah untuk merokemendasikan strategi yang disarankan.

Badan Usaha Milik Desa harus mempunyai strategi dalam mempertahankan eksistensinya termasuk di masa yang serba sulit karena dampak pandemi covid-19. BUMDes Karya Bersama di desa Dukuhjati Kidul termasuk yang dapat tetap produktif dalam pengelolaan unit usahanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terkait upaya apa saja yang telah dilakukan BUMDes untuk menguatkan pengelolaannya sehingga dapat survive, dan dalam riset ini akan menyajikan analisis mendalam tentang hal tersebut. Mengingat kondisi BUMDes yang stabil (meliputi keuangan, pengelolaan) selama menghadapi dampak pandemi covid-19, sehingga perlu dilakukan penelitian mendalam. Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana penguatan pengelolaan BUMDes Karya Bersama di masa pandemi covid-19?

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya terkait dengan penelitian deskriptif kualitatif diantaranya (Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2009, Lexy J. Moleong, 2004 dan Hadari Nawawi, 2003) para ahli ini berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset, video, dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus. Data temuan yang telah diperoleh dihubungkan keterkaitannya satu dengan yang lain untuk menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang melibatkan beberapa informan yaitu Sekretaris Desa (sekdes) Dukuhjati Kidul, Bendahara BUMDes, dan Pimpinan BUMDes. Informan Sekdes sebagai representasi pemerintah desa sehingga dapat mengetahui sejauhmana keterlibatan pemdes dalam mengelola BUMDes. Informan bendahara dan pimpinan BUMDes dipilih untuk mendapatkan informasi mendalam terkait pengelolaan BUMDes yang telah dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang antara lain adalah catatan hasil wawancara, hasil observasi, data-data mengenai informan, kemudian data sekunder yang antara lain berupa dokumen sebagai penunjang kelengkapan informasi untuk melengkapi dan memperkuat hasil fokus penelitian dapat berupa data angka, dan lain sebagainya yang berkorelasi dan valid terhadap penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan mengambil inti jawaban wawancara yang menjadi pokok dari pembahasan.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau membuat deskripsi terkait penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Bersama pada unit usaha peternakan sapi. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif memudahkan penulis untuk menggali lebih dalam berbagai upaya yang dilakukan Karya Bersama untuk bisa tetap produktif di masa pandemi covid-19. Data yang diperoleh oleh penulis dari dari informan yang telah dipilih dilakukan dengan metode wawancara, pengamatan, dokumen-dokumen. Penulis beranggapan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif lebih relevan dalam menggali data dan informasi tentang penguatan BUMDes Karya Bersama.

TEMUAN DAN HASIL

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Bersama Desa Dukuhjati Kidul

BUMDes Karya Bersama didirikan pada 18 Desember 2017 berdasarkan hasil musyawarah desa, kemudian regulasi pengelolaannya tercantum pada Perdes No. 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan BUMDES Karya Bersama di Desa Dukuhjati Kidul Kec. Pangkah Kab. Tegal. Merujuk pada regulasi tersebut, BUMDES Karya Bersama bergerak di berbagai jenis/ unit usaha. Beberapa

jenis usahanya seperti bisnis sosial, usaha perantara, penyewaan, berdagang, usaha bersama, dan bisnis keuangan (Pasal 5-8 Perdes 5/2017). Terdapat beberapa jenis usaha yang dijalankan yaitu berdagang (peternakan sapi) dan masih dalam rintisan adalah PPOB (Payment Point Online Bank) yang bisa menjadi tempat pembuatan rekening listrik namun belum berjalan efektif. Sejauh ini hanya peternakan sapi yang produktif.

Berdasarkan Keputusan Kades Dukuhjati Kidul No. 23 Tahun 2017, BUMDES Karya Bersama dikelola sumber daya manusia yang telah ditetapkan, berikut detailnya: pimpinan adalah direktur BUMDes; tiga orang bertindak sebagai pengawas (ketua, sekretaris, anggota), pengawas disini adalah pengurus yang dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa; empat orang sebagai pengurus (ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara); dan tiga orang sebagai pelaksana unit peternakan dan pertanian (ketua, sekretaris, bendahara). Selain ketiga posisi di atas, ada penasihat yang dijabat oleh kepala desa. Semua SDM tersebut bahu membahu untuk mengelola BUMDES kuat dan produktif.

Kewenangan pengelolaan BUMDes diantaranya adalah berwenang untuk membuat kebijakan usaha secara internal/ eksternal, membuat rancangan usaha di berbagai bidang yang memberikan keuntungan kepada BUMDES, mengembangkan unit usaha sesuai dengan kebutuhan & peluang usaha, mengatur seluruh jalannya operasional BUMDES secara profesional & akuntabel, independen & mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pengelolaan BUMDes yang telah dilakukan selama ini sudah baik karena terjalin sinergitas antara pemerintah desa dengan pengurus BUMDes di semua tingkatan mulai dari ketua pengurus hingga anggota. Ketua BUMDes adalah orang yang telah berpengalaman dalam bisnis kayu, sehingga kepiawaiannya dalam mengelola bisnisnya dapat dipraktekkan untuk memajukan BUMDes dan telah berhasil. Dalam setiap kegiatannya, bendahara BUMDes juga berperan untuk mendukung tertib administrasi dengan selalu mendokumentasikan setiap proses keluar/ masuknya dana yang dimiliki BUMDes dari proses menjalankan unit peternakan sapi. Kerjasama yang harmonis selalu menjadi bagian terpenting dalam pengelolaannya, pemdes dan BUMDes juga melakukan rapat rutin minimal 1 tahun dua kali guna membahas proses pembelian sapi, pengelolaan peternakan sapi dan penjualan sapi.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan agar dilakukan perbaikan pengelolaan BUMDes dalam beberapa tahun ke depan. Pertama, merekrut sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes yang hanya fokus mengelola BUMDes dan kreatif memaksimalkan fungsi dan kinerja BUMDes, bukan hanya pada satu unit usaha tetapi beberapa unit usaha secara bertahap. Pertanggungjawaban BUMDes langsung kepada kepala desa yang diwujudkan setiap tahunnya dengan adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes (Pasal 24 Perdes No. 5 tahun 2017). Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa (pada 31/8/2021), bahwa keuntungan penjualan yang didapatkan dari peternakan sapi sudah dikelola dengan maksimal untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat diantaranya untuk menyantuni anak yatim piatu, memperbaiki sarpras desa yang rusak dan telah disimpan sebagian uangnya sehingga nantinya dapat digunakan untuk membeli lahan agar status tanah/ lahan BUMDes adalah hak milik dan dikelola secara mandiri mengingat selama ini lahan berstatus sewa. Dengan adanya lahan milik BUMDes atau pemdes, maka tidak perlu mengeluarkan biaya sewa tahunan.

Kinerja Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama Unit Usaha Peternakan Sapi

Dalam menentukan pilihan unit usaha yang dijalankan, BUMDes harus jeli melihat peluang dan potensi yang dimiliki desa. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, maka dipilihlah bidang

usaha peternakan sapi, dengan jenis produk/ jasa yaitu penjualan ternak sapi. Peternakan sapi dipilih karena potensi keberhasilan yang besar mengingat berbagai kelengkapan usaha juga telah tersedia seperti lahan yang luas, tempat & jalan menuju peternakan strategis, banyak variasi jenis produk sapi yang ditawarkan, dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan Sekdes Dukuhjati Kidul, unit usaha peternakan sapi direalisasikan dengan metode menggemukkan sapi (5 bulan sebelum Idul Adha). Peternakan sapi ini dikelola oleh 10 orang peternak berpengalaman untuk ‘ngopeni sapi’. Sapi yang dibeli, kemudian dipelihara dan digemukkan dengan memakan rumput dan berbagai makanan tambahan serta vitamin ternak agar kualitas dagingnya terjaga. Sejak didirikan, berbagai perkembangan positif telah terjadi pada unit usaha peternakan sapi, berikut uraiannya:

Tabel 2. Perkembangan Pengelolaan BUMDes Karya Bersama

Tahun	Kegiatan	Pengeluaran Lain-Lain	Modal Pembelian Sapi	Total Penjualan Sapi
2017	Rintisan pembuatan BUMDes	a. sewa tanah & pembuatan kandang. b. sewa tanah selama 5 tahun sebesar Rp. 5 Juta. c. pembuatan kandang sebesar Rp. 70 Juta.	Rp. 125 Juta (belum dibelanjakan karena baru ada anggaran bulan Desember 2017)	Belum ada
2018	Pengoperasian kandang sapi	Perlengkapan, konsentrat, dll sebesar Rp. 5 Juta	Rp. 120 Juta (8 ekor)	Rp. 200 Juta
2019	Pembersihan & merapikan kandang sapi	Beli konsentrat, perlengkapan, pembuatan sumur, pasang listrik.	Rp. 182 Juta+Rp. 86,5 Juta (dapat tambahan modal dari desa) untuk beli sapi 20 ekor)	Rp. 460 Juta
2020	Pembuatan pagar keliling & merapikan jalan masuk kandang	Beli seng, bambu, konsentrat, sirtu untuk pengerasan jalan.	Rp. 400 Juta (27 ekor)	Rp. 648 Juta
2021	Perbaikan kandang & jalan	Pembelian perlengkapan kandang & sirtu untuk urug jalan akses masuk kekandang sapi	Rp. 600 Juta (40 ekor)	Rp. 960 Juta
Total				Rp. 2,2 M

Sumber: Laporan Tahunan BUMDes Karya Bersama

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja BUMDes unit usaha peternakan sapi Karya Bersama dari tahun ke tahun secara bertahap mengalami penyempurnaan, terlihat dari beragamnya kegiatan yang dilakukan, kemudian terjadi peningkatan jumlah modal untuk membeli sapi (dana berasal dari APB Desa), dan meningkatnya hasil penjualan. Salah satu strategi yang berhasil dilakukan adalah dengan ‘memilih waktu’ yang tepat untuk menggemukkan sapi yaitu lima bulan menjelang hari raya Idul Adha. Menjual produk sapi mendekati hari raya Idul Adha juga menjadi strategi jitu, karena saat itulah permintaan meningkat dan harga jual sapi naik

sehingga hasil penjualan mendapat keuntungan yang optimal. Cara penjualannya adalah melalui pembeli yang mendatangi langsung peternakan sapi, dan diawali promosi dari mulut ke mulut agar semakin banyak orang yang tertarik membeli sapi sehingga konsumen dapat datang memilih langsung sapi yang akan dibeli.

Terkait pengelolaan unit usaha peternakan sapi ini, ada beberapa catatan perbaikan dan analisis penting. Pertama, mengenai kegiatan rapat/ pertemuan yang masih minim dilakukan antara BUMDes dan Pemdes, dikarenakan kesibukan masing-masing pihaknya, sejauh ini rapat hanya dilakukan menjelang pembelian bibit sapi dan setelah penjualan sapi, padahal apabila rapat dan koordinasi rutin dilakukan dapat membahas upaya pengembangan unit usaha BUMDes dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Hal kedua, menyangkut cara mengelola peternakan sapi dari hanya menggemukkan, dapat dirubah menjadi ternak sapi seutuhnya guna mendorong proses terwujudnya kemandirian dan profesionalitas pengelolaan BUMDes. Peternakan yang hanya menggemukkan sapi yang selama ini dilakukan mendekati Idul Adha, menunjukkan bahwa unit usaha ini masih sebatas mengejar memperoleh profit besar dalam waktu singkat sehingga tidak mengedepankan upaya keberlanjutan (kontinuitas). Profit besar didapatkan dari contohnya satu ekor sapi dibeli seharga Rp. 16 Juta, digemukkan (5 bulan) kemudian dijual dengan harga berkisar Rp. 23-25 Juta. Keberlanjutan dalam ternak sapi ini tidak dilakukan karena dapat memperbesar biaya operasional harian karena dana yang dibutuhkan tidak sedikit untuk membayar upah tenaga kerjanya, membeli vitamin ternak, renovasi kandang dan sebagainya.

Melihat potensi yang ada, sebenarnya unit usaha peternakan sapi ini dapat lebih produktif ketika pengelolaan unit usaha peternakan sapi menjalankan proses ternak secara keseluruhan mulai dari membeli bibit sapi, memelihara, mengembangbiakkan, menggemukkan, hingga menjualnya. Potensi tersebut seperti tersedianya rumput sebagai makanan pokok, peternak sapi yang berpengalaman dan pemasaran sapi yang memudahkan pembeli agar produk sapi laku terjual dan profit maksimal. Dengan mengelola peternakan sapi secara keseluruhan, akan membuktikan bahwa pengelolaan BUMDes lebih profesional dan mandiri. Potensi yang baik harus dapat dimanfaatkan dengan memperluas pasar konsumen hingga ke luar daerah kabupaten Tegal bahkan hingga tingkat nasional sehingga Karya Bersama terkenal sebagai BUMDes produsen daging sapi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap daging sapi berkualitas tinggi.

Penguatan Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama di Masa Pandemi Covid-19

Sebagai sebuah organisasi formal dan legal, BUMDes menjadi salah satu ujung tombak dalam membangun perekonomian desa. Faktor eksternal BUMDes juga memengaruhi produktivitasnya, apalagi di masa pandemi covid-19 dimana berbagai pihak dihadapkan dengan situasi sulit dan tidak mudah diprediksi. Karya Bersama merupakan salah satu BUMDes yang solid sehingga mampu bertahan di masa pandemi. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan terjadinya penguatan dalam pengelolaan BUMDes, serta yang tidak kalah penting adalah menyoroti kebermanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat desa, hal tersebut teramati dari beberapa hal sebagai berikut:

1) **Konsistensi dalam menjalankan Peraturan Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Badan Usaha Milik Desa Dukuhjati Kidul Kabupaten Tegal**

Landasan formal BUMDes telah dibuat, dengan berbekal Peraturan Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka BUMDes Karya Bersama telah resmi terbentuk. Adanya peraturan desa (perdes) dalam pembentukan BUMDes ditujukan agar mampu menjadi pedoman dan sebagai dasar dalam berkegiatan. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Dengan adanya Perdes pembentukan BUMDes diharapkan para pengurus BUMDes mampu mengelola usaha yang dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya demi kelancaran dan perkembangan BUMDes (Budiarta, 2017).

Pendes Dukuhjati Kidul telah mengeluarkan Perdes Nomor 5/ Tahun 2017 tentang pembentukan BUMDES di Desa Dukuhjati Kidul, Pangkah, Tegal. Perdes tersebut secara konsisten telah dilaksanakan sebagai landasan peraturan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam mengelola BUMDes Karya Bersama. Detail pasal-pasal didalamnya tersusun sistematis dan telah memuat semua hal penting dalam pengelolaan BUMDes, mulai dari ketentuan umum, menguraikan dengan jelas tentang fungaaasi, tugas dan wewenang BUMDes hingga detail susunan kepengurusan BUMDes yang telah ditetapkan. Konsistensi pelaksanaan Perdes tersebut dapat memudahkan dalam melakukan pertanggungjawaban atas kinerjanya. Sehingga semua elemen dapat bersinergi menguatkan BUMDes Karya Bersama walaupun di masa pandemi covid-19.

Selanjutnya, berkaitan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART). Ketentuan AD/ ART diatur dalam pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. AD/ART berfungsi sebagai **acuan pengelola dan karyawan BUMDes dalam bekerja**, sehingga mereka memiliki gambaran yang harus dikerjakan. Selain itu, AD/ ART menjadi panduan dasar dan batasan yang akan dilakukan oleh para anggota dan pengurusnya. Mengacu pada hal tersebut, BUMDes Karya Bersama telah menjalankan seluruh ketentuan dalam AD/ ART sehingga tidak ada penyimpangan pelaksanaan kewenangan maupun pengurus yang melakukan tindakan yang illegal.

Karya Bersama telah memiliki landasan legal formal yang menjadi kekuatan dasar sebagai sebuah BUMDes yang menjadi mitra pemerintah desa dalam upaya membangun desa dan menyejahterakan masyarakatnya. Bermodalkan kekuatan itulah seluruh komponen BUMDes secara konsisten menjalankannya, aturan-aturan yang ada dapat mengarahkan langkah anggotanya agar terarah menjalankan aktivitasnya, saling bekerjasama, dan jelas pertanggungjawaban seluruh aktivitas kinerjanya. Menjadi BUMDes yang produktif dan bermakna harus terus diupayakan sehingga penting untuk memastikan seluruh aktivitasnya ‘on the track’ pada jalur pengelolaan yang sah, dan memastikan seluruh aktivitasnya legal dan produktif untuk menguatkan pengelolaan BUMDes Karya Bersama.

2) **Optimalisasi Kualitas dan Kuantitas Produk Peternakan Sapi di Masa Pandemi Covid-19 BUMDes Karya Bersama Desa Dukuhjati Kidul Kabupaten Tegal**

Pandemi covid-19 turut berdampak pada kegiatan pengelolaan Karya Bersama. Beberapa dampak yang dirasakan adalah unit usaha peternakan dan perdagangan daging sapi menjadi kurang stabil. Pertama, karena permintaan dari konsumen berkurang, kedua harga jual di pasaran mulai menurun sedangkan proses produksi (produktifitas peternakan dan oprasional)

semakin tinggi. Dari kondisi tersebut, ada permasalahan pada proses pengelolaan unit usaha peternakan sapi khususnya terkait proses penjualan selama tahun 2020. Namun masalah tersebut dapat dicarikan solusinya, dengan penerapan digital marketing atau strategi pemasaran online yang harus ditingkatkan, diberdayakan dan dikembangkan oleh para pebisnis. Digital marketing menurut Urban (2004:2) adalah menggunakan internet dan teknologi informasi untuk memperluas dan meningkatkan fungsi marketing tradisional (Solusinya, 2021). Ketika digital marketing dijalankan oleh Karya Bersama, maka terbuka peluang untuk memasarkan produk dan potensi pendapatan yang tinggi dari peternakan sapi, pemasaran online bisa diandalkan untuk menjangkau pasar di luar wilayah kabupaten Tegal.

Merespon kondisi pandemi covid-19, penguatan pengelolaan BUMDES dilakukan dengan cara mengoptimalkan hasil peternakan sapi. Mulai dari pemilihan bibit sapi, proses penggemukan sapi hingga penjualan sapi. Dikutip dari (Slawiayu.com), pada awal pembelian bibit sapi, berasal dari wilayah Randudongkal Pemalang dan Pacitan, Jawa Timur dengan sapi berjenis simetal. Pada aspek kuantitas (jumlah) sapi yang digemukkan juga mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2021 berturut-turut berjumlah 8, 20, 27, hingga 40 ekor sapi. Dengan kondisi tersebut, potensi keuntungan penjualan yang diperoleh berkisar Rp. 8 Juta hingga Rp. 10 Juta, karena harga pembelian bibit sapi awal berkisar Rp. 15 Juta sampai Rp. 16 Juta, setelah dilakukan proses penggemukan dan pemeliharaan, sapi laku terjual pada harga Rp. 23 Juta sampai dengan Rp. 25 Juta per ekor.

Keberhasilan penguatan pengelolaan BUMDes dapat terlihat dari meningkatnya harga jual sapi setelah digemukkan. Dari hal tersebut membuktikan bahwa proses pemeliharaan sapi telah dilakukan dengan baik seperti pemberian makan dan minum yang teratur, pemenuhan asupan makanan tambahan dan pemberian obat cacing sehingga sapi sehat dan berat badannya meningkat. Dalam (Rakyat, 2008) mengungkapkan bahwa keberhasilan peternakan dipengaruhi oleh banyak faktor, yang terdiri dari faktor internal yang berupa faktor genetik dan faktor eksternal yaitu faktor pakan, perkandangan, breeding, pengendalian penyakit, penanganan saat panen dan pemasaran. Berdasarkan hasil pengamatan, peternakan sapi Karya Bersama telah melakukan berbagai upaya tersebut di atas untuk mencapai keberhasilan peternakan.

Metode penggemukan sapi yang telah dilakukan, sebaiknya perlu diganti dengan menguatkan pengelolaan pengembangbiakkan sapi. Bibit sapi yang dibeli, ditanamkan hingga menghasilkan beberapa anak sapi kemudian digemukkan. Hal ini akan membuat Karya Bersama lebih kontinu produktivitasnya, sehingga produk daging sapi dapat tersedia setiap saat dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat baik dalam lingkup kabupaten/ kota bahkan pada skala nasional. Dengan metode baru ini, dapat membuat Karya Bersama lebih profesional, mandiri, dan terkenal sebagai produsen daging sapi yang berkualitas.

Mengoptimalkan kualitas produk unit usaha ternak sapi BUMDes Karya Bersama membutuhkan sinergi seluruh komponen pengelola BUMDes. Sinergi tersebut juga melibatkan SDM di luar kepengurusan BUMDes yaitu orang-orang yang memelihara sapi. Langkah nyata untuk mewujudkan meningkatnya kualitas dan kuantitas ternak sapi yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan kelayakan upah para pekerja tersebut. Semakin sejahtera kondisi keuangannya, akan semakin baik dalam bekerja memelihara sapi sehingga hasil ternaknya sehat dan kualitasnya terjamin. Dengan semangat menjadikan produk sapi berkualitas tinggi maka akan mendorong kemajuan dan penguatan BUMDes karena pendapatan meningkat, bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat.

3) Kepemilikan Lahan sebagai Prioritas Penguatan Pengelolaan BUMDes Dukuhjati Kidul Kabupaten Tegal

BUMDes yang kuat adalah yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Pemaknaan berdikari tersebut diterapkan dalam upaya penguatan pengelolaan Karya Bersama dengan mengusahakan kepemilikan lahan peternakan sapi agar menjadi hak milik dari BUMDes, dalam hal ini dikelola oleh pemerintah desa. Lahan peternakan sapi yang luas akan lebih leluasa apabila kepemilikannya dapat diambil alih dengan cara pembelian lahan. Mengingat selama ini peternakan sapi berdiri di atas lahan/tanah warga yang disewa oleh BUMDes. Sewa lahan dilakukan untuk jangka waktu sewa lima tahun (5 tahun) dengan nominal Rp. 5 Juta.

BUMDes memilih untuk menyewa lahan milik warga dikarenakan belum memiliki lahan sendiri, serta mempertimbangkan situasi lingkungan sekitar kandang (di ujung wilayah RT 2 RW 3) yang jauh dari permukiman warga sehingga tidak menimbulkan masalah bau kotoran sapi. Berdasarkan keterangan wawancara dengan Sekdes, terkait kepemilikan lahan, BUMDes mulai menyisihkan 10% uang dari hasil penjualan sapi untuk membeli tanah/ lahan potensial sebagai lokasi peternakan sapi. Ketika lahan telah menjadi hak milik, dalam beberapa tahun mendatang tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar sewa lahan sehingga uang hasil penjualan sapi dan keuntungannya dapat digunakan untuk lebih menyejahterakan masyarakat desa.

Mengusahakan kepemilikan lahan agar menjadi hak milik ini adalah langkah yang tepat mengingat pentingnya lahan sebagai tempat beroperasinya kegiatan peternakan sapi. Membeli lahan/ tanah agar menjadi hak milik merupakan investasi jangka panjang untuk lebih memprioritaskan penggunaan dana untuk keperluan yang lebih produktif seperti biaya operasional harian sebagai upaya meningkatkan kualitas peternakan sapi mulai dari pembuatan kandang, pemeliharaan sapi, pembelian pakan dan vitamin sapi, dan sebagainya.

4) Penguatan BUMDes sebagai Upaya Menyejahterakan Masyarakat Desa Dukuhjati Kidul, Kabupaten Tegal

Menguatkan pengelolaan BUMDES Karya Bersama pada dasarnya adalah untuk memberikan manfaat bagi warga desa. Hasil dari unit usaha peternakan secara bertahap diprioritaskan untuk kepentingan warga. Uang hasil penjualan sapi sebagian telah dipertuntukkan sebagai sumber dana untuk pengadaan sembako murah, menyantuni banyak anak yatim piatu (per anak Rp. 300.000) pada acara Muharoman, dan santunan pada para warga lansia di desa atau dengan kata lain untuk kegiatan sosial 25%, dan membangun sarana prasarana (misal perbaikan saluran air) yang kurang baik. Dengan demikian, penguatan BUMDES Karya Bersama telah bermuara pada kebermanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Semakin berhasilnya BUMDes, akan menunjukkan sumbangsih positifnya terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Pemerintah Desa Dukuhjati Kidul telah berhasil membangun sinergitas yang positif dengan BUMDes dan seluruh masyarakat. Walaupun karakteristik sebagian masyarakat desa kurang partisipatif, namun pemdes dan BUMDes berusaha menunjukkan bahwa mereka hadir di tengah-tengah masyarakat dengan jalan mengoptimalkan potensi unit usaha peternakan sapi yang mampu berproduksi cukup tinggi. Agar semakin maksimal, BUMDes membutuhkan gebrakan ide dan action untuk memperluas jaringan guna menjalankan unit usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat luas seperti pengelolaan air, pengembangan SDM di desa, dan sebagainya sehingga kebermanfaatannya BUMDes semakin dirasakan seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Badan Usaha Milik Desa harus bisa bertahan walaupun di masa sulit karena pandemi covid-19. Diperlukan langkah nyata untuk menguatkan pengelolaan BUMDes seperti yang telah dilakukan Karya Bersama. Beberapa upaya penguatan pengelolaan BUMDes di masa pandemi covid-19 yang telah dilakukan dapat pada tiga hal mendasar yakni mengimplementasikan regulasi dasar meliputi Perdes Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan BUMDes Dukuhjati Kidul, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); berfokus pada meningkatkan proses pengelolaan unit usaha dan mutu hasil produk peternakan sapi, serta berusaha mewujudkan kemandirian dalam kepemilikan lahan yang difungsikan sebagai peternakan sapi sehingga ke depan pengelolaan BUMDes dapat lebih produktif dengan mengalokasikan penggunaan dana kepada kegiatan operasional yang produktif sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di desa Dukuhjati Kidul, Pangkah, Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal EL-RYASAH*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.656>
- Ardhana Putra, I. N. N., Bisma, I. D. G., Andilolo, I. R., & Mandra, I. G. (2019). PENINGKATAN PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN TENUN DI DESA SUKARARA. *Abdi Insani*, 6(3), 422–431. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v6i3.283>
- Barelli, L., Bidini, G., Cinti, G., Zhang, H. H., Wang, L., Van, J., Mar, F., Desideri, U., Khalil, A., Tauler, C. M., Pantou, S., Nr, S., Ouyang, L., Ma, M., Huang, M. S., Duan, R., Wang, H., Sun, L., Zhu, M., ... Intl, S. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Energies*, 6(1), 1–8. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- Bogor, K., Thalib, S., & Hermawati, A. (n.d.). MASYARAKAT DESA MELALUI.
- Budiarta, I. W. (2017). EFEKTIVITAS PERAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM MENCEGAH KREDIT BERMASALAH PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) GUNA ARTHA DI DESA TRI EKA BUANA. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9748>
- Depok, K., Sleman, K., & Yogyakarta, D. I. (2020). Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan) MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Bumdes Panggung Lestari, Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul). 03(6), 14–23.
- Dzikrulloh, A. R. E. P. (2016). Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan Dzikrulloh. *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–10.
- Febriana, N. (2021). MANAJEMEN STRATEGI PEGELOLAAN DESA AGROWISATA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA WATESARI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO Nisa. *Publika*, Volume 9 N(3), 29–42.

- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 95–103. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>
- Firdaus, S. (2018). Fenomena Elite Capture Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 20. <https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.20-37>
- Hidayat, F. A., & Warsono, H. (2020). Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Delta Mulia Di Desa Panempun Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 27–38. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.189>
- Moleong J. Lexy, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nawawi Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Pardi, & Istiyanto, B. (2020). Analisis Transfaransi Dan Akuntabilitas Dana Desa Sebagai Penguatan Badan Usaha Milik Desa. 04(02), 1–13.
- Puspayanthi, N. L. P. A. D., Prayudi, M. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Penguatan pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi peran bumdes untuk kemandirian desa pada desa di Kabupaten Jembrana. *E-Journal Akuntansi Undiksha*, 8(2), 1–12.
- Rakyat, M. K. (2008). Endah Subekti Peranan Bidang Peternakan 4(2), 32–38.
- Ramadana, C. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1068–1076.
- Saragi, N., & Abdullah, A. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Objek Wisata di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 17. <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i2.6894>
- Solusinya, D. A. N. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Laju Ekonomi Indonesia 2020. 3, 13–27.

Undang-Undang dan sejenisnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Perdes No. 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan BUMDES Karya Bersama di Desa Dukuhjati Kidul Kec. Pangkah Kab. Tegal.

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga BUMDes Karya Bersama Desa Dukuhjati Kidul, Pangkah, Tegal.

Kondisi Ekonomi RI Makin Terpuruk Saat Dilanda COVID-19 (idntimes.com)